

## KEBERLANGSUNGAN PANDEMI COVID-19 DAN DAMPAKNYA BAGI PEREMPUAN KOTA PADANG

### *COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON WOMEN IN THE CITY OF PADANG*

Soraya Oktarina

Dosen Ilmu Politik UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi  
Sorayaoktarin4@gmail.com

**ABSTRAK :** Virus SARS-CoV2 muncul menjadi suatu petakut dan mampu merubah tatanan kehidupan manusia. Tak hanya mengancam kesehatan, namun juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, keagamaan, hingga relasi gender. Kota Padang, tak luput menjadi daerah terdampak Covid-19. Berbagai upaya pencegahan dilakukan namun tak jarang kebijakan yang dihasilkan bersifat dilematis terutama bagi kelompok perempuan. Kebijakan pembatasan, pemberlakuan *Work form Home* dan sistem belajar *online*, hingga terhentinya sejumlah sektor usaha kian menambah beban baru bagi perempuan di Kota Padang. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan didalam sebuah keluarga, hingga keterbatasan akses pemenuhan kebutuhan perempuan kian menghasilkan ketimpangan. Munculnya kebijakan-kebijakan penanganan pandemi pun tak sepenuhnya mengakomodir tuntutan perempuan. Selama kondisi pandemi di Kota Padang menunjukkan adanya kenaikan *trend* kasus kekerasan terhadap perempuan serta penambahan tingkat pengangguran penduduk kelompok perempuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi perempuan di Kota Padang saat berbagai kebijakan penanggulangan pandemic mulai diterapkan.

Kata kunci : pandemi, perempuan, kebijakan

*ABSTRACT: The SARS-CoV2 virus appears to be a fear and is able to change the order of human life. Not only threatens health, but also has an impact on all sectors of human life, ranging from economic, social, religious, to gender relations. The city of Padang, was not spared from being an area affected by Covid-19. Various prevention efforts were carried out, but not infrequently the policies produced were in a dilemma, especially for women's groups. Restriction policies, the implementation of Work form Home learning systems online, until the cessation of a number of business sectors have added to a new burden for women in the city of Padang. Inequality of power relations between men and women in a family, so that limited access to women's needs is increasingly producing inequality. The emergence of policies to handle the pandemic did not fully accommodate the demands of women. During the pandemic conditions in the city of Padang, there was an increase in the trend of cases of violence against women as well as an increase in the unemployment rate of the female population. This research is a descriptive qualitative that tries to describe the condition of women in the city of Padang when various policies to overcome the pandemic began to be implemented.*

*Keyword : pandemic, woman, rules*

### A. PENDAHULUAN

Di akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh kemunculan sebuah virus baru yang memiliki gejala berupa gangguan pernafasan, seperti batuk, pilek, demam, hingga sesak nafas. Ditemukan pertama kali di Wuhan China, virus ini terdeteksi berasal dari golongan *coronavirus*, dan memiliki tingkat penularan, tingkat mutasi hingga resiko kematian tinggi. Memasuki tahun 2020, virus yang

berpotensi menyebabkan *pneumonia* akut ini mulai ditemukan di negara-negara lain dan dengan cepat menginfeksi hingga ribuan jiwa. Berbagai kasus terkonfirmasi positif dilaporkan, mulai dari yang bergejala ringan, sedang, berat hingga menelan korban jiwa. Tepat pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan bahwa *SARS-Cov2* atau yang biasa dikenal dengan Covid-19 menjadi sebuah wabah dunia atau pandemi.

Semua negara di dunia mengalami *shock* ketika pandemi datang. Tidak ada satupun negara yang memiliki persiapan ataupun rancangan metode kesiapsiagaan penanganan covid. Hingga ditengah situasi darurat, berbagai kebijakan terpaksa segera diambil guna mengantisipasi penyebaran dan dampak korban jiwa lebih besar. Cara pertama dalam mencegah jatuhnya korban lebih besar, adalah dengan memutuskan atau meminimalisir mata rantai penularan. Dengan tingkat penularan Covid-19 yang sangat tinggi, hanya memakan waktu 5-10 detik saja, maka upaya awal yang bisa diterapkan adalah membatasi interaksi manusia atau *physical distancing*. Untuk mendorong terciptanya *physical distancing*, maka sejumlah regulasi pembatasan mulai dikeluarkan. Jika di sejumlah negara menerapkan metode karantina atau *lockdown*, di Indonesia dengan segala pertimbangan, pemerintah memilih metode pembatasan atau yang dikenal dengan PSBB.

Kebijakan pembatasan merubah sistem aktivitas masyarakat Indonesia, seperti; Sistem pembelajaran sekolah beralih menjadi sistem belajar dirumah (*online*), perkantoran mengganti sistem kerja dengan *Work from Home* (WFH), tempat- tempat publik di tutup untuk sementara waktu, kegiatan yang mengikutsertakan orang banyak dilarang, tempat usaha makanan, cafe dan restoran tidak diizinkan beroperasi sementara waktu, intinya bagaimana mengalihkan semua aktifitas yang biasanya dilakukan dalam ruang public menjadi ke ruang privat atau rumah. Dengan adanya kegiatan pembatasan ini, membuat covid tak hanya lagi sebatas ancaman kesehatan namun juga memberi dampak cukup serius bagi perekonomian, sosial dan tak terkecuali kesetaraan perempuan.

Perubahan tatanan kehidupan, pengalihan dari ruang *public* menjadi ruang privat memberikan beban baru bagi perempuan. Covid memang tidak memandang jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan beresiko terkena covid. Namun ketika melihat dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari pandemic covid, posisi kelompok perempuan menjadi lebih rentan. ketidakpastian kondisi perekonomian membawa dampak yang lebih buruk bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Perempuan yang tanpa pandemi pun telah lebih dulu mengalami beban ganda dan belum pada posisi yang setara dengan laki-laki.

Sebagai pembanding data awal, di Kota padang jumlah kasus Covid-19 hingga bulan Agustus Tahun 2022, diperkirakan telah mencapai sebanyak 50 ribu lebih kasus terkonfirmasi positif dengan pasien yang berakhir meninggal dunia sebanyak 590 lebih orang. Data Pasien yang terkonfirmasi positif menunjukkan bahwa jumlah pasien laki-laki yang terpapar kasus Covid-19 lebih tinggi dibandingkan perempuan (Laporan Profil Kesehatan Kota padang). Kerentanan yang dihadapi oleh laki-laki berkaitan dengan pola pergerakan mereka yang lebih banyak berada di luar rumah daripada perempuan. Namun dibalik kerentanan laki-laki tersebut, memunculkan beban dan tugas baru yang mau tidak mau ditanggung perempuan. Laki-laki yang sebelumnya bergerak bebas diluar, selama pandemi covid harus berdiam diri dirumah. Pekerjaan yang biasanya bebas dilakukan diluar rumah, saat ini tak lagi bisa dikerjakan, belum lagi penutupan sejumlah sektor usaha produksi membuat para laki laki tak jarang kesulitan dalam menunaikan tanggung jawab pemenuhan nafkah keluarga. Perempuan yang selama ini menjadi kunci utama sebuah keluarga, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Tak hanya soal kebutuhan perut keluarga, perempuan juga harus bertanggung jawab tentang pendidikan anak, kebutuhan ekonomi keluarga, hingga menghadapi resiko psikologi emosional laki-laki. Di Kota Padang, terjadi trend kenaikan indeks ketimpangan gender antara laki laki dan perempuan sepanjang pandemi, senilai 0,156 % . Penelitian ini mencoba untuk menguraikan tentang kondisi perempuan di Kota Padang sejak pandemi berlangsung, bagaimana kebijakan-kebijakan pandemi yang diambil penuh dilematis dan berdampak pada kehidupan perempuan

## B. PEMBAHASAN

Upaya penanganan pandemi Covid-19, tak hanya dilakukan pemerintah pusat, namun seluruh lembaga bergerak cepat, berkordinasi dan merumuskan langkah-langkah kebijakan termasuk pemerintahan setingkat Kabupaten/kota. Setiap kabupaten kota harus secepat mungkin mengambil sebuah kebijakan public guna meminimalisir dampak yang lebih luas. Woll dikutip oleh Tangkilisan menguraikan kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat ( Tangkilisan: 2003). Setiap kabupaten/ kota diberikan wewenang untuk mengambil kebijakan disesuaikan dengan kondisi didaerahnya masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan kabupaten/kota juga diharapkan tercipta dengan tetap memperhatikan unsur-unsur budaya lokal.

Kebijakan-kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 meski bersifat hirearki terpusat dari atas ke bawah, namun pemerintah daerah wajib melakukan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah Kota Padang pun secara sigap segera membentuk berbagai macam turunan kebijakan penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan pertama yang dilakukan yakni membentuk satuan tugas penanganan covid dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Dinas Sosial Kota Padang dan juga Dinas Kesehatan Kota Padang serta OPD terkait lainnya. Tak hanya membentuk Satgas covid, sejumlah kebijakan dalam penanganan pandemi covid pun dihasilkan pemerintah kota Padang, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Adaptasi Pola Hidup Baru (PHB), hingga kebijakan Adaptasi kebiasaan baru (AKB)

Namun yang menjadi pertanyaan apakah dari sekian banyak kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Padang memuat atau memperhatikan konsep gender. Marilee S. Grindle, menguraikan bahwasanya suatu kebijakan itu dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of police*) dan implementasi (*conteks of police*) (Subarsono: 2005.). Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertampung dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target *group*, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, apakah pengaplikasian dan porsi program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, serta apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Dalam hal ini menarik untuk dilihat apakah kebijakan-kebijakan pembatasan yang dilakukan selama pandemi berlangsung telah memperhatikan tuntutan dan kebutuhan perempuan, apakah perempuan dilibatkan dalam proses perumusan, apakah perempuan memiliki pengecualian dalam pelaksanaan pembatasan mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan

Berdasarkan wawancara dengan satgas pelaksanaana penanggulangan pandemi Covid Kota Padang, diketahui bahwa setiap pengeluaran kebijakan telah didahului dengan diskusi bersama yang melibatkan seluruh stakeholder, tokoh agama, tokoh adat dan kelompok lainnya, namun dalam pembuatan kebijakan diakui tidak menfokuskan berdasarkan klasifikasi gender ataupun jenis kelamin. Baik perumusan ataupun pelaksanaan kebijakan bersifat umum dan berlaku untuk semua tanpa pembedaan jenis kelamin, yang menjadi sasaran dan perhatian penting adalah kelompok masyarakat rentan atau yang memiliki komorbid.

Ketidak-terlibatannya perempuan dalam perumusan kebijakan dan langkah penanganan pandemi di Kota Padang, dikhawatirkan akan semakin mempertajam ketimpangan kesejahteraan perempuan.

*Kami menyayangkan kebijakan penangan pandemic covid kota padang tidak melibatkan kelompok perempuan, harusnya pembuatan kebijakan dilakukan dengan berbagai tahapan seperti tahapan dengar pendapat dan mengundang dari berbagai kelompok unsur masyarakat terutama*

*perempuan, hal ini karena kebutuhan perempuan pada realitanya berbeda dengan kaum laki-laki. (aktivis LSM Nurani Perempuan)*

Didalam suatu kebijakan public, dikenal dengan namanya *policy outcomes* yakni merupakan dampak yang timbul dan terjadi sebagai respon balik dari pemberlakuan kebijakan. Dampak ini dapat sesuai harapan ataupun tidak sesuai yang diharapkan sebagai konsekuensi ada atau tidaknya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Paska pemberlakuan kebijakan pandemi di Kota Padang, terjadi berbagai masalah baru yang dialami oleh kelompok perempuan. Pertama, pemberlakuan kebijakan *School From Home* (sekolah dari rumah). Membuat perempuan harus mampu mengalokasikan waktunya untuk mengurus rumah tangga, sekaligus mendampingi anak belajar. Bagi kelompok perempuan bekerja, dituntut harus mampu membagi diri dengan mengurus permasalahan rumah lainnya yang dibebankan kepadanya. Selama Kebijakan Pembatasan guna penanggulangan dampak pandemic Covid-19, pendidikan mengharuskan proses pembelajaran di sekolah dipindahkan ke rumah dan dilakukan secara online dengan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran, mulai dari *zoom, meet, whatsapp*, hingga aplikasi lainnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran dirumah, siswa diwajibkan memiliki sejumlah perangkat yang mendukung kegiatan belajar mengajar, seperti android, computer, dan lainnya. Metode belajar tersebut serta merta menambah biaya beban dan pengeluaran keluarga. Setiap siswa dituntut untuk membeli gadget dan kuota internet. Belum lagi jika di dalam sebuah rumah, terdiri dari lebih satu anak. Waktu pembelajaran yang bersamaan tidak memungkinkan penggunaan gadget secara bergantian, sehingga harus dilakukan pembelian tambahan. Permasalahan yang muncul tidak semua kelompok masyarakat mampu membeli barang tersebut. Perempuan sebagai ibu rumah tangga memiliki tekanan psikis dan moral ketika harus menyaksikan bahwa sang anak tak dapat belajar secara mestinya. Selain itu, selama proses belajar online, orang tua diharapkan bisa mendampingi sang anak, sementara dilain sisi bagi orang tua terutama perempuan juga memiliki beban kerja yang harus dilakukan misalnya memasak, membereskan rumah, belum lagi bagi perempuan yang bekerja mencari nafkah. Tidak jarang kondisi seperti ini justru memunculkan masalah baru pada keluarga. Kondisi ini bias dari timpangnya pembagian tugas serta rendahnya relasi kuasa perempuan dalam rumah tangga (Alon dkk: 2020).

Kota Padang yang sejatinya memiliki *social culture matriarhki*, menempatkan perempuan di posisi sentra, realitanya tak ubah dengan daerah lainnya. Pembagian peran yang terjadi di dalam keluarga masih menjadi hasil wujud norma patriarkhi., posisi dan status laki-laki masih ditempatkan lebih tinggi daripada perempuan. Perempuan dianggap memiliki kewajiban utama dalam hal masalah rumah tangga, mulai dari perut, kasur, pendidikan anak, bahkan selama pandemi, perempuan tak jarang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tak sedikit, juga ada perempuan yang harus menghadapi psikologi suami yang bermasalah akibat terkena pemutusan kerja paska Covid melanda. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya trend peningkatan kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang selama Pandemi Covid berlangsung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang mencatat, kasus kekerasan yang didampingi selama 2020 mencapai 275 kasus. Naik sebanyak 131 kasus dibandingkan tahun 2019 (langgam.id). Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan juga ditemukan pada pelaporan yang diterima oleh LSM Nurani perempuan, sebuah organisasi masyarakat sipil Kota Padang yang berfokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan

**Tabel 1 Kasus kekerasan perempuan yang Diterima LSM Nurani Perempuan**

Jenis kasus	2020	2021
Perkosaan	34	26
Trafficking	2	0

Penganiayaan	2	0
Pelecehan seksual	13	15
Eksplorasi seksual	3	1
Kekerasan dalam rumah tangga	32	47
Sodomi	1	4
Non-ktp-bg	1	2
Kbgo (eksploitasi gambar)	6	9
<b>Jumlah</b>	<b>94</b>	<b>104</b>

Kebijakan pembatasan, mengalihkan seluruh aktivitas ruang public ke dalam ranah privat, membuat satu keluarga memiliki kesempatan lebih banyak untuk berkumpul dan melakukan interaksi. Yang menjadi soal, bagaimana dengan masyarakat kelompok ekonomi miskin yang hanya memiliki hunian 2x3 meter. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Padang, angkanya meningkat tajam, ada penambahan sekitar 6 ribu jiwa lebih penduduk miskin di Padang, yakni dengan jumlah keseluruhan 48,44 ribu jiwa. Kelompok masyarakat miskin dengan hunian ukuran 2x3 meter harus berbagi dan menjalani 24 jam dengan seluruh anggota keluarganya. Tidak ada lagi aktivitas yang bisa dilakukan diluar ruangan, semua masyarakat harus berdiam diri dan melakukan *social distancing*. Keterbatasan ruang gerak membuat hubungan khususnya bagi pasangan suami istri menjadi terhalang, Hubungan suami istri yang biasanya dilakukan ketika anak- anak berangkat sekolah, menjadi tidak bisa lagi dilaksanakan. Di sisi lain, perempuan sebagai “si yang paling bertanggung jawab” terhadap keadaan rumah, tetap dituntut menunaikan kewajibannya. Perempuan tetap memasak, berbelanja, mencuci, atau mencari tambahan uang. Sementara kaum pria yang kesulitan mendapatkan jatah” tadi dipaksa pandemi berada didalam satu tempat terbatas dengan anak, memberikan peluang terjadi tindakan perilaku kekerasan seksual terhadap anak.

Hal ini kian diperparah dengan penggunaan gadget yang tak terkendali. Tidak adanya kegiatan yang dapat dilakukan, memaksa individu menghabiskan waktunya dengan bermain gadget. Pengaruh teknologi menjadi faktor utama munculnya kekerasan-kekerasan terhadap perempuan. Tidak adanya edukasi dan batasan dalam pengaksesan gadget tak jarang, gadget digunakan untuk mengakses hal-hal negatif seperti situs-situs porno sehingga memicu timbulnya perilaku menyimpang. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kelompok usia besar, bahkan gadget yang seharusnya digunakan untuk anak-anak mengakses pelajaran pun, pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk bermain game online. Tak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisikpun rentan terjadi akibat perubahan tatanan pola kehidupan selama pandemik. Kesempitan ruang gerak, terbatasnya aktivitas dan kurangnya penghasilan memunculkan efek psikologis negatif bagi sejumlah orang terutama laki-laki. Ketidakstabilan emosi menjadi pemicu terbanyak munculnya kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana perempuan menjadi sasaran paling empuk kemarahan dalam satuan keluarga terkecil. Hal ini dapat dilihat pada data yang ditunjukkan tabel 1 bahwasanya kekerasan yang paling banyak terjadi pada perempuan selama pandemic berlangsung yakni berupa kasus perkosaan dan KDRT.

Tak hanya resiko kekerasan, selama pandemi perempuan juga mengalami ancaman kesehatan pada kesehatan reproduksi dikarenakan perubahan prioritas pelayanan kesehatan. Perempuan merupakan kelompok yang lebih dominan membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang lebih banyak dari laki-laki, terutama untuk kelompok ibu hamil dan menyusui, perempuan peserta KB, ataupun kelompok perempuan rentan dan usia subur. Perubahan skema pelayanan kesehatan dari tatap muka menjadi online, dan banyaknya prosedur awal screening bagi pengakses layanan kesehatan membuat ketakutan dan penurunan minat bagi perempuan untuk mengakses

pelayanan kesehatan dirinya. Di Kota Padang, terjadi penambahan kasus kematian ibu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Kasus kematian Ibu yang ditemukan pada tahun 2020 sebanyak 21 kasus, terdiri dari ibu hamil 9 orang, ibu bersalin 3 orang dan ibu nifas 9 orang. Jika dilihat dari sisi umur maka ibu yang meninggal terbanyak adalah ibu yang berumur 20-34 tahun yaitu sebanyak 11 orang. Sementara pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus kematian ibu pada kategori ibu nifas dan angka kematian ibu (dilaporkan) yang naik menjadi 218 kasus dari tahun 2020 hanya 152 kasus.

**Tabel 2 Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin di Puskesmas Kota Padang Tahun 2019-2021**

No.	Jenis Kelamin	2019	2020	2021
1	Laki-Laki	320,357	88.179	340.545
2	Perempuan	320,200	130.858	340.451

Terjadi penurunan kunjungan masyarakat ke tempat pelayanan kesehatan di kota padang di awal pandemi berlangsung. Adanya kepanikan dan ketakutan akan terkena atau terdeteksi positif covid menjadi penyebab utama. Belum lagi rangkaian prosedur screening seperti swab dan rapid membuat trauma psikomatis sendiri bagi masyarakat untuk menempuh pelayanan kesehatan di tempat public.

Tak hanya mengalami ancaman dalam bidang perlindungan keamanan diri dan kesehatan, perempuan pun dibayang-bayangi dengan beban ekonomi yang kian besar ketika pandemi terjadi. Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2020 mencapai angka 13,64 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding angka nasional maupun provinsi Sumatera barat, bahkan pencapaian TPT Kota Padang pada tahun tersebut menjadi angka pengangguran yang tertinggi diantara kota/kabupaten di Sumatera Barat. sampai awal tahun 2022, jumlah pengangguran di Kota Padang mencapai 65 ribu jiwa, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran adalah banyaknya karyawan yang di PHK-terdampak covid.

Sementara untuk provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk usia kerja hingga bulan agustus 2021 mencapai angka 4,08 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut terdapat presentase penduduk usia kerja yang terdampak covid-19 sebesar 7,70 persen, dengan rincian; (1) 31,57 ribu orang pengangguran karena covid-19, (2) 13,64 ribu orang Yang tergolong bukan angkatan kerja (BAK) karena covid-19, (3) sebanyak 16,78 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan (4) sebanyak 251, 86 ribu jiwa bekerja dengan pengurangan jam kerja karena covid-19 (BPS Provinsi Sumatera Barat).

**Tabel 3 Jumlah Data Pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Klasifikasi Pendidikan Januari s/d Desember 2020**

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	Tidak sekolah	0	1	1
2	SD	52	56	108
3	SLTP	71	129	200
4	SLTA	2.636	2.898	5.534
5	D1	1	1368	0
6	D2	0	0	538
7	D3	170	5	5
8	D4	0	702	1.187
9	S1	5	42	47
10	S2	5	42	47

Jumlah	3.420	4.201	7.621
--------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang 2020

Klasifikasi pengangguran Kota Padang selama tahun 2020, ditinjau dari jenis kelamin, di dominasi oleh kelompok perempuan. Berdasarkan Laporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2021, sebanyak 53.052 perempuan Kota Padang terdata sebagai kepala keluarga.

Kembali berbicara tentang *policy output*, kebijakan kebijakan pandemi terbukti telah memberikan dampak terhadap kondisi perempuan di Kota Padang. Tanpa pandemi saja, kita menyadari peran dan kebutuhan perempuan dan laki-laki tidak bisa disamakan. Berbicara tentang status dan peranan sosial berarti berbicara tentang gender. Gender berbeda dengan hal jenis kelamin. Jenis kelamin adalah seputar kodrat dan kondisi biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki laki. Sementara gender adalah apa-apa yang melekat kepadanya di dalam perannya sebagai makhluk sosial. Kesetaraan gender erat kaitannya dengan keseimbangan, keadilan dan ketidaktimpangan. Suatu Kesetaraan gender bisa terwujud jika semua orang baik laki laki ataupun perempuan dapat memiliki kesempatan, akses, partisipasi dan melakukan kontrol atas pembangunan dan mendapatkan manfaat secara adil dan merata, tidak adanya ketumpang tindihan, diskriminasi atau pembatasan hak.

Kaum perempuan menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai persoalan dampak dari pandemi. Beban ganda, kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menjadi tulang punggung keluarga, pembatasan akses kesehatan dan gerak, hingga potensi mengalami kekerasan berbasis gender merupakan masalah kaum perempuan yang timbul beriring dengan berlansungnya pandemi Untuk itu, sangat penting memperhatikan dan mempertimbangan prinsip perspektif gender dalam proses peremusan, pembuatan hingga implementasi penanggulangan bencana pandemi Covid-19.

### C. KESIMPULAN

Suatu kebijakan publik muncul atas suatu desakan dan tuntutan keadaan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil sepatutnya mempertimbangkan segala aspek, tak terkecuali gender. Pemindehan ruang aktivitas dari publik ke privat, membuat si pemegang tanggung jawab di wilayah privat memiliki pe-er tambah. Keputusan pemerintah dalam pembatasan dan peralihan ruang aktivitas tersebut selayaknya mempertimbangkan kondisi perempuan. Meski secara data, pasien covid-19 lebih didominasi oleh laki-laki, tapi jika dilihat secara dampak yang lebih luar, kemerosotan taraf kualitas hidup perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, mulai dari kelompok pengangguran yang lebih di dominasi perempuan, peningkatan kasus kekerasan perempuan, Perempuan dibayangi oleh kondisi pemutusan hubungan kerja dikarenakan terhentinya aktivitas perekonomian pada sektor yang didominasi oleh perempuan, hingga pelayanan kesehatan reproduksi yang terbatas selama masa pandemi COVID-19.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, dan Yudi Rusfiana. 2006. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabetha.
- Aslamiyah,S.(2021).*Dampak Covid-19 terhadap perubahan psikologis,social dan ekonomi pasien Covid-19 di Kelurahan Dendang,Langkat, Sumatera Utara .Riset Dan*

*Pengabdian Masyarakat*,1(1),56–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.664>

- Agustina, E., Ernawati, Irvita, M., & Putri, C. P. (2021). *Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender*. Prosiding Konferensi Nasional Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia,01(01),89–100
- Alon, T. M., Doepke, M., Olmstead-Rumsey, J., & Tertilt, M. (2020). The Impact of COVID-19 on Gender Equality.
- Djoharwinarlien, Sri. 2012. *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM.
- Fakih. Mansour. 2012. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Fadillah Ulva dan Meyi Yanti. *Dampak Psikologis Pandemi COVID-19 Bagi Masyarakat Kota Padang*. JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan). 2021
- Ikfina Chairani. *Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Gender Di Indonesia*. Jurnal Kependudukan Indonesia |. Edisi Khusus Demografi dan COVID-19, Juli 2020
- Vivi Ukhwatul K Masbiran. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata Sumatera Barat*.2020
- Wewen Kusumi Rahayu. *Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Perempuan Terhadap Keluarga Terdampak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*. Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas. 2022

## **Buku**

- Krisis Kemanusiaan Covid-19 Dan Implikasinya Pada Tatanan Perekonomian Global. Laporan Perekonomian Indonesia 2020
- Lakip Dinas Tenaga Kerja Dan Perinrstian Kota Padang Tahun 2020 Dan 2021
- Profil Gender dan Anak Kota Padang tahun 2020.
- Profil laporan Dinas kesehatan Kota Padang 2021
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 . Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Padang
- UNICEF, UNDP, Prospera, dan SMERU (2021). *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia*, Jakarta.